

Lampiran I Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1022/IP/DPMPSTSP/VIII/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pen dele gasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NURUL FRIDA APRILIA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. K.H.M. Kasim Lr. Dermawan Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 201820106

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO

Lokasi Penelitian : RUMAH SAKIT UMUM SAWERIGADING PALOPO
Lamanya Penelitian : 23 Agustus 2022 s.d. 23 November 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 23 Agustus 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sultsel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)

Ll. 2 Gedung MCC Universitas Muhammadiyah Palopo
Jl. Jend. Sudirman Km. 03 Binturu, Kota Palopo (91959) – Telp/Fax: (0471) 327429

Nomor : 276/III.3.AU/LPPM/F/2022 Palopo, 21 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Palopo
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan Studi Strata Satu (S.1) pada Universitas Muhammadiyah Palopo diwajibkan menyusun karya ilmiah (Skripsi) sebagai salah satu syarat penyelesaian studi. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian untuk memperoleh data yang valid guna mendukung dan terlaksananya penyusunan Skripsi. Sehubungan dengan maksud tersebut, mohon kiranya diberikan izin melakukan meneliti, kepada:

Nama : Nurul Frida Aprilia
Stambuk/NIRM : 201820106
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Program Studi : Manajemen
Alamat : Jl. KH Ahmad Kasim, Kota Palopo
No. Hp. : 082312506330

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo".

Demikian permohonan dari kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

- Dekan Bersangkutan
- Peringgal

Lampiran II Kuesioner Pertanyaan

No.	Pertanyaan
1.	Landasan hukum apa yang diterapkan RSUD Sawerigading Palopo untuk penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD?
2.	Bagaimanakah proses penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo serta apakah maksud dan tujuannya?
3.	Apa peran penting dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo?
4.	Apa sajakah kendala interal dan eksternal yang ada pada penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Sawerigading Palopo?
5.	Terdapat hasil perhitungan rasio keuangan pada laporan keuangan RSUD Sawerigading Palopo, apakah nilai rasio tersebut dinilai baik untuk Rumah Sakit?

Lampiran III Laporan Keuangan RSUD Sawerigading Palopo

1. Pengukuran Aset

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki Rumah Sakit ketika melakukan proses operasinya serta komponen penting karena menunjang berjalannya aktivitas. Nilai aset Rumah Sakit akan terus diperbarui dan harus di laporkan dalam laporan keuangan Rumah Sakit. Aset RSUD Sawerigading Palopo diukur sebagai berikut :

a. Kas

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum Rumah Sakit. Kas dicatat sebesar nominal.

b. Investasi

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi

tersebut. Sedangkan investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang pendapatan dituliskan diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

2. Pendapatan

“Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, penerimaan surplus, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya pada Tahun Anggaran 2021. Pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp.66.576.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.67.527.517.901,27 atau 101,43%” (Sunarti, S.Sosinforman RSUD Sawerigading Palopo). Pendapatan operasional yang diperoleh selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp.79.865.437.532,00

Tabel 4.1. : Pendapatan dalam LRA

Uraian	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2020
		Nilai	%	
Pendapatan Jasa Layanan	66.415.200.000	67.317.783.832	101,38	106.492.988.729
Pendapatan Hasil	103.200.000	147.357.000	142,81	188.969.000
Lain-lain pendapatan BLUD	57.600.000	62.359.069	108,26	901.836.211
Pendapatan hibah	-	-	-	-
Jumlah	66.576.000.000	67.527.517.901	101,43	109.583.793.941

Pendapatan APBD mengalami penurunan dari Rp.69.130.445.034,00 pada periode 2020 menjadi Rp.56.486.928.057,00 pada periode 2021 atau menurun sebesar 18%

3. Belanja

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada RSUD Sawerigading Palopo direncanakan sebesar Rp.64.126.550.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.63.521.877.751,00 atau 99,06%. Terdapat sisa anggaran Rp.604.672.249,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada RSUD Sawerigading Palopo direncanakan sebesar Rp.35.780.100.471,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.33.396.158.874,13 atau 93,34%. Terdapat sisa anggaran Rp.2.383.941.596,87.

c. Belanja Modal

Belanja modal pada RSUD Sawerigading Palopo direncanakan sebesar Rp.27.844.006.737,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.27.157.334.073,00 atau 97,53%. Terdapat sisa anggaran Rp.686.672.664

Tabel 4.2. : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Nilai	%
1.	Belanja Operasi	99.906.650.471,00	96.918.036.625,13	97,01
	Belanja pegawai	64.126.550.000,00	63.521.877.751,00	99,06
	Belanja barang dan jasa	35.780.100.471,00	33.396.158.874,13	93,34
2.	Belanja Modal	27.844.006.737,00	27.157.334.073,00	97,53
	Belanja tanah	-	-	-
	Belanja peralatan medis	27.844.006.737,00	27.157.334.073,00	
	Belanja gedung dan bangunan	-	-	
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	-	-	
	Belanja aset tetap lainnya	-	-	
	Jumlah	127.750.657.208	124.075.370.698	97,12

4. Aset

A. Aset Lancar

a. Kas Bendahara BLUD

No. Rekening koran 170-00-9999202-00 Rp.4.070.081.628,00

Kas BLUD Rp.327.060.395,00

kas SKPD Rp. 0,00

kas Penerimaan BLUD Rp.4.257.048,00 +

Jumlah Rp.4.401.398.971,00

b. Piutang

Adalah piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp.27.624.303.908,00

terdiri dari :

Piutang BPJS	Rp.9.151.196.053,00
Piutang Jampersal	Rp. 0,00
Piutang Kerjasama Inhealth	Rp. 0.00
Piutang Kerjasama (Jasa Raharja)	Rp.429.224.655,00
Piutang Kerjasama (Parkir)	Rp.10.500.000,00
Piutang pasien (BPJS)	<u>Rp.18.033.383.200,00+</u>
Jumlah	Rp.27.624.303.908,00

c. Persediaan Bahan Habis Pakai

Adalah persediaan bahan habis pakai per 31 Desember 2021.

Persediaan Obat-obatan	Rp.2.430.209.207,00
Persediaan BHP Alkes	Rp.2.816.270.998,00
Persediaan ATK	Rp.9.435.199,00
Persediaan Cetak Rekam Medik	Rp.68.483.00,00
Persediaan Alat Kebersihan	Rp.35.963.610,00
Persediaan Alat Kantor & Rumah Tangga	Rp.607.200,00
Persediaan Tabung Oxygen	Rp.2.827.000,00
Persediaan Alat Listrik	Rp.11.142.627,00
Persediaan Alat Dapur	Rp.32.053.500,00
Persediaan Mamin Petugas	Rp.4.922.407,00
Persediaan Mamin Pasien	Rp.13.143.383,00
Persediaan Pakaian Kerja	<u>Rp.36.422.350,00 +</u>
Jumlah	Rp.5.461.480.481,00

B. Aset Tetap

a. Tanah

Adalah aset tetap per 31 Desember 2021

Saldo Awal Rp.3.641.520.400,00

Pengadaan s/d 31 Desember 2021 Rp. _____ 0,00 +

Saldo per 31 Desember 2021 Rp.3.641.520.400,00

b. Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.184.704.960.543,00 dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin (SKPD) Rp.116.064.142.638,00

Peralatan dan Mesin (BLUD) Rp.58.985.154.696,00

Peralatan dan Mesin (APBN) Rp. _____ 0,00 +

Jumlah Rp.175.049.297.334,00

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan (SKPD) Rp.102.171.374.443,00

Gedung dan Bangunan (BLUD) Rp.3.349.643.786,00

Gedung dan Bangunan (APBN) Rp. _____ 0,00 +

Jumlah Rp.105.521.018.229,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan (SKPD) Rp.7.451.322.316,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan (BLUD) Rp.245.834.000,00 +

Jumlah Rp.7.697.156.316,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Rp.4.150.000,000
Penambahan	<u>Rp.991.000,00</u> +
Jumlah	Rp.5.141.000,00

C. Aset Lainnya

Adalah aset lainnya per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Aset Tidak Berwujud	Rp.15.107.975,00
Aset Tetap Lain-lain	<u>Rp.804.680.129,00</u> +
Jumlah	Rp.819.788.104,00

1. Kewajiban

A. Utang Usaha

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang per 31 Desember 2021 dengan rincian :

Hutang Obat	Rp.7.047.801.444,00
Hutang BHP Alkes	Rp.18217.252.007,00
Hutang Oxygen	Rp.116.490.000,00
Hutang BM	Rp.320.380.432,00
Hutang Persediaan dan Biaya	<u>Rp.3.461.331.668,00</u> +
Jumlah	Rp.29.163.255.551,00

B. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah tersebut merupakan pinjaman dari Bank per 31 Desember 2021 belum terbayar. Rincian hutang pada Bank pada tanggal neraca sebagai berikut :

Hutang pada BNI	Rp.521.500,00
Hutang pada Bank Mandiri	Rp. <u> 0,00</u> +
Jumlah	Rp.521.500,00
Total Utang	Rp.29.163.777.051,00

2. Ekuitas Dana

A. Ekuitas Dana Lancar

a. SILPA

Realisasi pendapatan	Rp.67.527.517.901,27
Realisasi belanja	Rp.124.075.370.698,00
SILPA tahun sebelumnya	Rp.14.261.802.211,00
Saldo per tanggal 31 Desember 2021	Rp.4.400.877.471,00

b. Cadangan Piutang

Adalah cadangan piutang per tanggal 31 Desember 2021 sebesar
Rp.27.624.303.908,00

c. Cadangan Persediaan

Adalah cadangan persediaan per tanggal 31 Desember 2021

Persediaan Obat-obatan	Rp.2.430.209.207,00
Persediaan BHP Alkes	Rp.2.816.270.998,00
Persediaan ATK	Rp.9.435.199,00
Persediaan Cetak Rekam Medik	Rp.68.483.00,00
Persediaan Alat Kebersihan	Rp.35.963.610,00
Persediaan Alat Kantor & Rumah Tangga	Rp.607.200,00
Persediaan Tabung Oxygen	Rp.2.827.000,00

Persediaan Alat Listrik	Rp.11.142.627,00
Persediaan Alat Dapur	Rp.32.053.500,00
Persediaan Mamin Petugas	Rp.4.922.407,00
Persediaan Mamin Pasien	Rp.13.143.383,00
Persediaan Pakaian Kerja	<u>Rp.36.422.350,00</u> +
Jumlah	Rp.5.461.480.481,00

d. Dana yang harus disediakan bagi utang jangka pendek ialah akun lawan dari utang jangka pendek sebesar Rp.29.163.777.051,00 terdiri dari :

Hutang Obat	Rp.7.047.801.444,00
Hutang BHP Alkes	Rp.18217.252.007,00
Hutang Oxygen	Rp.116.490.000,00
Hutang BM	Rp.320.380.432,00
Hutang Persediaan dan Biaya	Rp.3.461.331.668,00
Hutang pada BNI	Rp.521.500,00
Hutang pada Bank Mandiri	<u>Rp._____0,00</u>
Total Utang	Rp.29.163.777.051,00

B. EkiutasDana Investasi

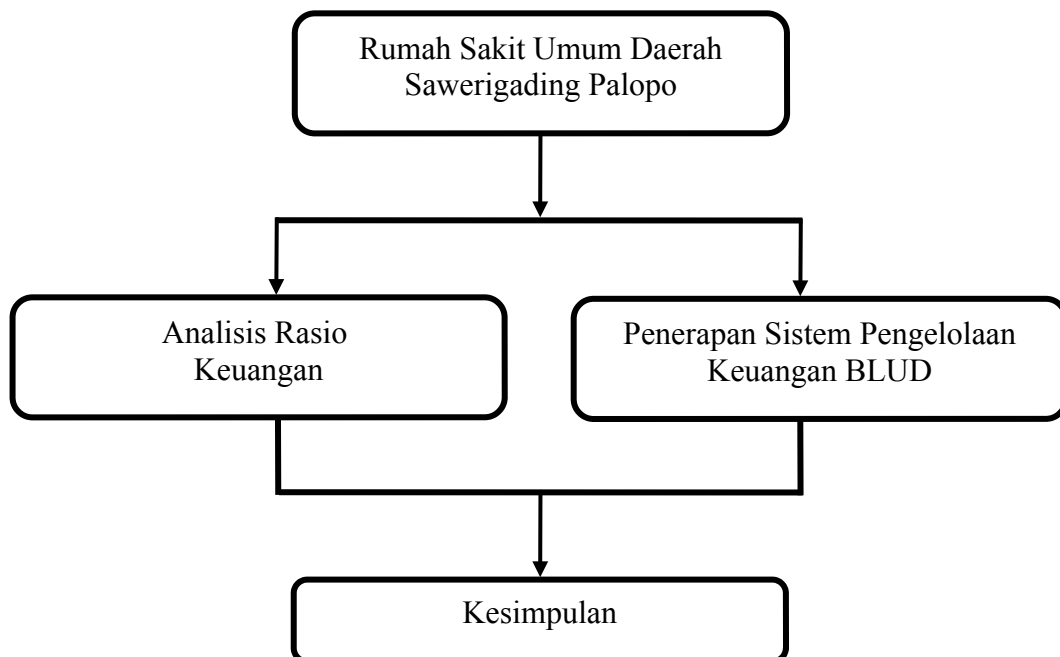
Diinvestasikan kedalam aset tetap	Rp.207.621.215.324,00
Diinvestasikan kedalam aset lainnya	<u>Rp.819.788.104,00</u>
Saldo per tanggal 31 Desember 2021	Rp.208.441.003.428,00

Lampiran IV RSUD Sawerigading Palopo

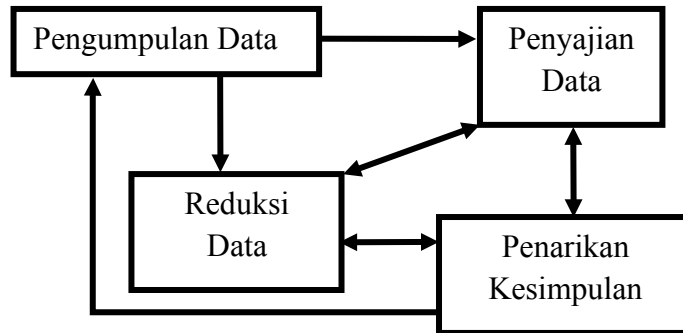


Lampiran V Daftar Gambar

1. Kerangka Konseptual

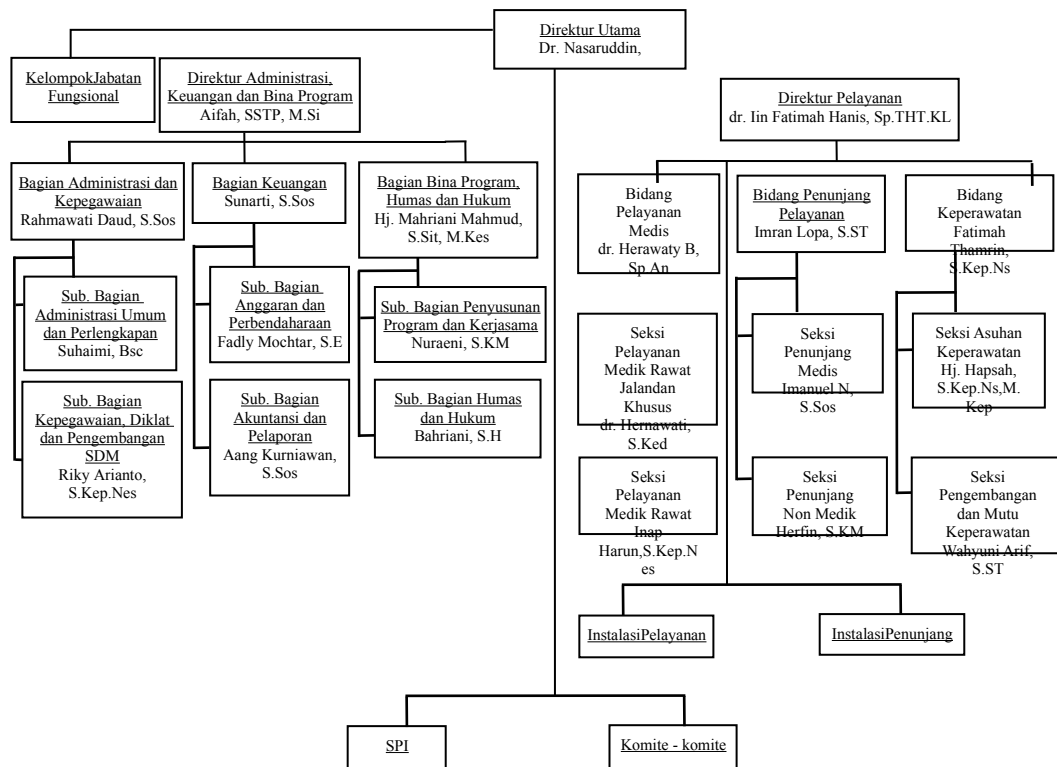


2. Analisis Data Model Miles dan Huberman



Gambar 3.1 : Analisis Data Model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015)

3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

4. Wawancara dengan Informan 1



5. Wawancara dengan Informan 2



6. Wawancara dengan Informan 3



Lampiran VI Daftar Tabel

Tabel 2.1. Penelitian Terlebih Dahulu

No	Nama Judul dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Trie Nadilla, Hasan Basri, Heru Fahlevi(2017)Identifikasi Permasalahan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)-Studi Kasus Pada Rumah Sakit Permata dan Rumah Sakit Berlian	Deskriptif Kualitatif	Hasil peneiltian menunjukkan rumah sakit tidak mampu menyajikan informasi akuntansi yang komprehensif karena laporan keuangan dihasilkan dari basis yang berbeda pelaporan keuangan berbasis akrual sementara anggaran berbasis kas, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang mumpunidan kurangnya komitmen manajemen untuk menerapkan konsep BLUD sebagai entitas bisnis.
2	Reni Riawati, Firman Pribadi (2018)Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Panembahan	Deskriptif Kualitatif	Awal proses implementasi banyak dijumpai hambatan yang bersumber dari ketidakfahaman SDM baik dari manajemen maupun keuangan. Tidak adanya piranti pendukung berupa SK Bupati atau Peraturan Bupati serta kurangnya kompetensi SDM keuangan. Tahun 2011-2012 disusun 15 petunjuk pelaksana berbentuk SK

	Senopati Bantul.		dan Peraturan Bupati, tahun 2012 SDM keuangan diganti dengan personil berbasis akuntansi. Dengan BLUD SDM didorong untuk bekerja dengan efektif dan efisien, karena BLUD merupakan badan nirlaba yang tidak mencari keuntungan. RSUD dapat berkembang bila pendapatan dikelola secara efisien dengan penganggaran yang berorientasi pada standar mutu SPM.
3	Mia Khairina (2017) Analisis Implementasi Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.	Deskriptif Kualitatif	1)RSSA ditetapkan sebagai BLUD dengan status BLUD penuh pada tanggal 30 Desember 2008. Sebagai BLUD penuh, berarti dalam hal pengelolaan keuangannya, RSSA diberikan kewenangan untuk mengimplementasikan fleksibilitas PK BLUD. 2)Implementasi fleksibilitas PK BLUD pada RSSA sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan diterapkannya nilai-nilai fleksibilitas pada tiap aspek pengelolaan keuangannya.
4	<i>U. Vina Dwirista</i> (2017) Analisis Penerapan Pola Penelolaan Keuangan Badan	Deskriptif Kualitatif	Aktivitas-aktivitas penerapann PPK-BLUD pada RSUD Sambas sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

	Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kabupaten Sambas		Layanan Umum dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Namun demikian, penerapan PPK-BLUD pada RSUD Sambas belum semuanya dapat berjalan secara sempurna dan optimal.
5	Riani Isye Kawenas, dkk (2019) Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori.	Penyajian laporan keuangan badan layanan umum pada RSUP Prof Dr. R. D. Kandou berdasarkan PSAP Nomor 13 telah diterapkan, namun belum secara keseluruhan, khususnya dalam mengakui pendapatan atas Kerjasama Operasional (KSO). Dalam penyusunan laporan keuangan masih ditemukan beberapa kendala antara lain (1) belum adanya regulasi yang jelas tentang pengertian KSO, (2) belum tersedianya aturan tambahan atau petunjuk teknis untuk menjabarkan penerapan PSAP Nomor 13 untuk KSO, (3) kurangnya komunikasi dari Kementerian Kesehatan RI kepada Rumah Sakit yang mengakibatkan kurangnya SDM yang memahami dan (4) adanya pengaruh penerapan PSAP Nomor 13 terhadap target realisasi PNBK pengaruh penerapan PSAP Nomor 13

			<p>pada penilaian kinerja Rumah Sakit. Karena pentingnya satuan kerja untuk patuh pada regulasi ini maka perlu diupayakan kebijakan pendukung untuk memastikan implementasi PSAP Nomor 13 berjalan sesuai ketentuan.</p>
6	<p>Bambang Azis Silahahi, dkk (2022) Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa setelah penerapan PPK-BLUD di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai, terdapat perubahan dimana sebelumnya proses pengelolaan anggaran, keuangan, dan pelaporan yang selama ini murni harus berdasarkan peraturan keuangan dengan mekanisme APBD. Namun dengan penerapan PPK-BLUD, seluruh pendapatan yang peroleh RSUD Djoelham dapat langsung dikelola dan dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan RSUD. Sehingga diharapkan dapat memperingkas birokrasi khususnya keuangan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi terutama pemahaman bagian dan bidang lain tentang PPK-BLUD yang ada di RSUD Djoelham Binjai sehingga dibutuhkan koordinasi yang</p>

			baik antar bagian dan bidang.
7	Syahril (2017) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) Pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.	Deskriptif Kualitatif	RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 61 Tahun 2007, hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa aturan yang belum dipenuhi. Rumah Sakit juga belum menggunakan semua laporan keuangan yang ditetapkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 hal ini dapat dilihat dari laporan semesteran.
8	Nanang Nopriandy P (2017) Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dapat dilihat laporan kinerja keuangan, untuk dapat menilai kinerja penelitian ini beracuan pada penentuan skor kinerja keuangan yang sama dengan Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan tertuang pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2014. Rasio kas sebesar 210,65% itu berarti skor rasio kas BLUD RSUD Haji Makassar sebesar 1,5. Rasio lancar sebesar 384,75% itu berarti rasio lancar BLUD RSUD Haji Makassar 1,5.

9	Ratna Suryaningsih (2018) Kinerja Keuangan Layanan Kesehatan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLU	Balanced Scorecard dengan strategi pengumpulan data secara ganda (triangulasi).	Penerapan BLU pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tidak memberikan perubahan yang signifikan pada Activity Growth. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan pertumbuhan tingkat pelayanan yang dilihat dari peningkatan volume kegiatan tidak terjadi perbedaan dengan adanya penerapan BLU pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.
10	Haryati, Nuning Tri (2017) <i>Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah prof. dr. margono soekarjo purwokerto</i> . Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.	Deskriptif Kualitatif	Sistem aplikasi yang terintegrasi dapat membantu kontrol dan evaluasi. Sistem reward dan punishment atas pencapaian kinerja. Birokrasi yang jelas sehingga tupoksi dan SOP didalam pencapaiannya dapat berjalan. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yaitu: Budaya ewuh pakewuh masih melekat pada penilaian kinerja pegawai. Transfer knowledge yang belum tuntas bila terjadi mutasi dan rotasi pegawai sehingga menghambat kelancaran sistem pelaporan dan evaluasi. Reward masih berupa reward individu, belum ada reward untuk unit yang berhasil mencapai target anggaran

Tabel 4.1. : Pendapatan dalam LRA

Uraian	Anggaran	Realisasi		Realisasi 2020
		Nilai	%	
Pendapatan Jasa Layanan	66.415.200.000	67.317.783.832	101,38	106.492.988.729
Pendapatan Hasil	103.200.000	147.357.000	142,81	188.969.000
Lain-lain pendapatan BLUD	57.600.000	62.359.069	108,26	901.836.211
Pendapatan hibah	-	-	-	-
Jumlah	66.576.000.000	67.527.517.901	101,43	109.583.793.941

Tabel 4.2. : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Nilai	%
1.	Belanja Operasi	99.906.650.471,00	96.918.036.625,13	97,01
	Belanja pegawai	64.126.550.000,00	63.521.877.751,00	99,06
	Belanja barang dan jasa	35.780.100.471,00	33.396.158.874,13	93,34
2.	Belanja Modal	27.844.006.737,00	27.157.334.073,00	97,53
	Belanja tanah	-	-	-
	Belanja peralatan medis	27.844.006.737,00	27.157.334.073,00	
	Belanja gedung dan bangunan	-	-	
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	-	-	
	Belanja aset tetap lainnya	-	-	
	Jumlah	127.750.657.208	124.075.370.698	97,12

Tabel 4.3. : Penentuan skor rasio kas

Rasio Kas dalam % (RK)	Skor
RK > 480	0,25
420 < RK ≤ 480	0,5
360 < RK ≤ 420	1
300 < RK ≤ 360	1,5
240 < RK ≤ 300	2
180 < RK ≤ 240	1,5
120 < RK ≤ 180	1
60 < RK ≤ 120	0,5
0 < RK ≤ 60	0,25
RK = 0	0

Tabel 4.4. : Penentuan skor rasio lancar

Rasio Lancar % (RL)	Skor
RL > 600	2,5
480 < RL ≤ 680	2
360 < RL ≤ 420	1,5
240 < RL ≤ 360	1
120 < RL ≤ 240	0,5
0 < RL ≤ 120	0,25
RL = 0	0

Tabel 4.5. : Penentuan skor periode penagihan piutang

Periode Penagihan Piutang % (Hari) (PPP)	Skor
$PPP > 30$	2
$30 \leq PPP < 40$	1,5
$40 \leq PPP < 60$	1
$60 \leq PPP < 80$	0,5
$80 \leq PPP < 80$	0,25
$PPP \leq 100$	0

Tabel 4.6. : Penentuan skor perputaran aset tetap

Perputaran Aset Tetap % (PAT)	Skor
$PAT > 20$	2
$15 < PAT \leq 20$	1,5
$10 < PAT \leq 15$	1
$5 < PAT \leq 10$	0,5
$0 < PAT \leq 5$	0,25
$PAT = 0$	0

Tabel 4.7. : Penentuan skor imbalan atas aset tetap

<i>Return on Fixed Asset %</i> (ROFA)	Skor
ROFA > 6	2
5 < ROFA ≤ 6	1,7
4 < ROFA ≤ 5	1,4
3 < ROFA ≤ 4	1,1
2 < ROFA ≤ 3	0,8
1 < ROFA ≤ 2	0,5
0 < ROFA ≤ 1	0

Tabel 4.8. : Penentuan skor imbalan ekuitas

<i>Return on Equity %</i> (ROE)	Skor
ROE > 8	2
7 < ROE ≤ 8	1,8
6 < ROE ≤ 7	1,6
5 < ROE ≤ 6	1,4
4 < ROE ≤ 5	1,2
3 < ROE ≤ 4	1
2 < ROE ≤ 3	0,8
1 < ROE ≤ 2	0,6
0 < ROE ≤ 1	0,4
ROE = 0	0

Tabel 4.9. : Penentuan skor perputaran persediaan

Perputaran Persediaan% (PP)	Skor
$PP > 60$	0
$55 < PP \leq 60$	0,5
$45 < PP \leq 55$	1
$35 < PP \leq 45$	1,5
$30 < PP \leq 35$	2
$25 < PP \leq 30$	1,5
$15 < PP \leq 25$	1
$5 < PP \leq 15$	0,5
$0 < PP \leq 1$	0,4

Tabel 4.10. : Penentuan skorrasio PNBPN terhadap biaya operasional

Rasio PNBPN terhadap biaya operasional % (PB)	Skor
$PB > 65$	2,5
$57 < PB \leq 65$	2,25
$50 < PB \leq 57$	2
$42 < PB \leq 50$	1,75
$35 < PB \leq 42$	1,5
$28 < PB \leq 35$	1,25
$20 < PB \leq 28$	1
$12 < PB \leq 20$	0,75
$4 < PB \leq 12$	0,5

$0 < PB \leq 4$	0

Tabel 4.11. : Penentuan skor rasio biaya subsidi

Rasio Biaya Subsidi % (SBP)	Skor
$SBP > 1$	0
$1 < SBP \leq 3$	0,5
$3 < SBP \leq 5$	1
$5 < SBP \leq 10$	1,5
$10 < SBP \leq 15$	2
$15 < SBP \leq 18$	1,5
$18 < SBP \leq 20$	1
$SBP \leq 20$	0,5